



POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 2 No. 1 Tahun 2019

Doi : 10.21043/politea.v2i1.4953

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>

Posisi Muslim dalam Menentukan Pilihan di Pilpres 2019

Yuangga Kurnia Yahya

University of Darussalam Gontor

yuangga4@unida.gontor.ac.id

Abstract

Muslim Position in Determining Options in the 2019 Presidential Election. This study aims to analyze the role and position of individuals in an Islamic society based on al-Qur'an. This research is based on Charles Taylor's individualism theory of a separate person (*The Disengaged Self*). Interest related to selfhood according to him is an inseparable thing in a community to avoid *taqlid*, religious fanaticism, and blind nationalism and. Every individuals have to create a disengaged self and strong evaluator themselves.

This study indicates that Islamic collectivity has often been distorted into practical collectivism which negates the role of individuals and constructs individuals into forced decisions. Finally, the actions of the community are not based on individual awareness in the community based on al-Qur'an. The freedom self-development will have an impact in building an strong Islamic community, and apart from blind fanaticism. Islam is a religion that uplifts human reason to be able to express as freely as possible, even in choosing state leaders.

Keywords: Individualism, Collectivism, Fanatic, Individual Freedom, Indonesia's Presidential Election

Pendahuluan

Banyak orang beranggapan bahwa paradigma Islam adalah paradigma kolektivisme. Hal tersebut dapat terlihat dari banyak semboyan yang digaungkan seperti 'Yadu'l Lah Ma'al Jama'ah' 'Tangan Allah bersama tangan jama'ah'. Paradigma ini yang di kemudian hari dipercayai bahwa Islam adalah sebuah gerakan kolektivistis dan tidak menghargai peran individu dalam suatu masyarakat Islam. Selain itu, individualisme dan penghargaan terhadap peran individu seringkali dicap sebagai produk modernitas Barat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Paradigma kolektivisme masyarakat Islam yang menyebar luas di dunia muslim saat ini berdampak cukup signifikan. Ketika kepentingan bersama dan tujuan jama'ah menjadi visi masyarakat, tidak sedikit kepentingan individual yang harus dikorbankan. Lebih buruk, paradigma ini menciptakan individu-individu yang kurang kreatif, inovatif, dan minim inisiatif di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial dalam suatu masyarakat Islam. Salah satu bukti adalah kebebasan dalam memilih cara hidup dan ajaran yang dianut. Toleransi yang merupakan salah satu dimensi metodologis peradaban Islam justru mulai luntur dan berganti menjadi sikap eksklusif yang kaku. Sikap yang demikian, pada akhirnya akan menghilangkan prinsip rasionalitas dan kolaborasi wahyu dan akal yang menjadi ciri khas Islam itu sendiri. Semuanya beralih 'demi kepentingan jama'ah'.

Pada 2019, Indonesia menghadapi tahun politik yang panas. Di tahun ini, diadakan pemilihan anggota Dewan (DPR, DPRD, dan DPD) dan yang paling ditunggu adalah pemilihan Presiden. Pemilihan presiden yang hanya terdiri dari dua calon ini menyisakan dua kemungkinan bagi para rakyat Indonesia, memilih nomor 1 atau nomor 2. Salah satu tagline yang banyak tersebar berbunyi bahwa salah satu calon presiden merupakan 'Calon Presiden Pilihan Ulama'. Hal ini tidak saja memberi dampak pada perolehan dukungan calon presiden lainnya, namun juga berimplikasi pada pengekanan inspirasi individu muslim dalam memilih calon presiden sesuai dengan hati nurani mereka.

Artikel ini akan membahas konsep individualisme dalam Islam, apakah ia benar-benar tidak pernah diperhatikan di dalam al-Qur'an? Penulis menggunakan teori Individualisme Charles Taylor untuk menganalisa peran individu yang ada di dalam al-Qur'an dan penerapannya dalam pembangunan sebuah masyarakat Islam. Bahkan lebih jauh, membangun sebuah peradaban Islam. Penulis juga membahas teori tentang individu di dalam Islam melalui apa yang disebut "The Self" dari Iqbal dan 'Person' dari Arkoun.

Pembahasan

Individualisme: Kombinasi antara Disengaged Self dan Strong Evaluator

Pembicaraan tentang individual di dalam artikel ini merujuk pada teori yang dikemukakan Charles Taylor. Menurutnya, individualisme yang ia maksud merupakan sinonim dari atomisme. Individualisme yang ia maksud adalah bahwasanya tiap-tiap individu di dunia ini lahir dengan berbagai keunikannya masing-masing. Tujuan dari tiap individu adalah mencapai tujuan pribadi masing-masing dengan berbagai cara, baik dengan usaha sendiri maupun bantuan dan kerjasama dari pihak lainnya dan bukan posesi untuk mengangkat kepentingan diri sendiri di atas kepentingan masyarakat bersama dalam berbagai hal (Crittenden, 1992, p. 3).

Individualisme ini merupakan jantung dari prinsip kebebasan itu sendiri. Jiwa yang bebas (*liberal self*) merupakan tujuan yang ingin diraih oleh pemikiran ini. Idealnya, jiwa yang bebas itu tidak memiliki identitas konstitutif sama sekali dan terlepas dari berbagai beban dan intervensi. Jiwa

tersebut dikatakan belum dapat bebas sepenuhnya saat masih terbelenggu dengan berbagai identitas bawaannya dan terbatas oleh batasan-batasan definisi yang ada. Pilihan manusia terhadap nilai yang ia yakini, kepercayaan yang ia anut, dan berbagai instrumen yang ia butuhkan dalam kehidupannya hanya berkaitan dengan tanggungjawabnya secara individu. Inilah yang membuat jiwa yang bebas menjadi seorang pemilih yang transenden, yang memilih sesuai dengan prinsip-prinsip yang ia anut (Crittenden, 1992, p. 3).

Pandangan ini mengakui dan menghargai keunikan tiap individu manusia. Prinsip dasar manusia didasarkan pada kebutuhan individu mereka. Dengan demikian, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat masing-masing (Crittenden, 1992, p. 3).

Prinsip ini merupakan sebuah prinsip seorang manusia modern, yang disebut Charles Taylor sebagai *Disengaged Self* 'pribadi yang terpisah'. Menurutnya, tiap individu harus menjadi agen pertama yang penuh dengan kesadaran dalam merepresentasikan banyak hal. Tapi hal tersebut tidak berlangsung sebebaskan itu. Tiap individu juga dituntut menjadi *Strong Evaluator* 'pengevaluasi yang kuat' terhadap tindakan yang dilakukan dan pilihan yang diambil. Inilah sebuah cara untuk menjawab pertanyaan 'Siapakah aku?' (*Who am I?*). Ketika kemampuan kedua ini hilang, manusia bukan saja kehilangan identitas personalnya, namun juga kehilangan identitas sebagai manusia itu sendiri (Crittenden, 1992, p. 17).

Untuk menggapai *disengaged self* yang ideal, individu perlu melewati 3 tahapan. Tahapan pertama adalah *interlocutor* 'teman bicara/teman akrab'. Artinya, seseorang butuh teman bicara khusus dalam suatu komunitas dan masyarakat dalam rangka mengetahui kapasitas dan kemampuan diri sendiri. Manusia akan cenderung terpengaruh egonya sendiri bila tidak menggunakan cara ini. Namun, teman bicara ini tidak melibatkan banyak individu, cukup pada individu yang dianggap mampu dan layak. Saat berinteraksi, ia juga disyaratkan untuk sedikit menarik diri dari komunitasnya untuk mengurangi intervensi dari luar (Crittenden, 1992, p. 15).

Tahap kedua adalah reflektivitas. Dalam tahap ini, ia merefleksikan berbagai penilaian yang diberikan teman tersebut dan mulai melihat ke dalam diri sendiri. Bila memang ada, maka ia layak diterima. Sebaliknya, ia berhak menolak bila penilaian tersebut tidak sesuai dengan yang ia yakini. Prinsip ini masih berfokus pada kemampuan individu dalam mengenal dirinya sendiri (Crittenden, 1992, p. 15).

Tahap ketiga adalah interiorisasi kepribadian. Setelah melakukan refleksi, individu mulai akan menerima dan membuka diri terhadap hal-hal yang ia yakini benar dalam rangka pengembangan dan modernisasi diri. Konservatisme diri dan ketidakmampuan menerima masukan dan pembaharuan justru menjadi sebuah boomerang bagi diri sendiri. Namun, menerima semua masukan tanpa merefleksikannya juga meniadakan kemampuan nalar dan akal manusia itu sendiri (Crittenden, 1992, p. 15).

Di akhir, individu yang mencapai kesadaran dengan refleksi yang radikal terhadap dirinya sendiri dapat berkontribusi maksimal dalam masyarakat. Mereka menjadi citra kreatif yang

memiliki prinsip ‘mampu untuk mengubah diri menjadi lebih baik dengan pandangan yang benar’ yang pada akhirnya dapat melahirkan berbagai gagasan baru dan segar. Hal ini untuk meraih keseimbangan antara peran individu dan masyarakatnya. Saat masyarakat terlalu banyak berperan dan mengacuhkan peran individu, maka masyarakat tersebut hanya akan dipenuhi individu-individu lemah yang tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan diri dan hanya ikut-ikutan (Crittenden, 1992, p. 21). Karenanya, dalam membangun masyarakat dan peradaban Islam yang kokoh, dibutuhkan individu-individu yang sudah ‘selesai’ dengan urusan pribadi mereka, yang dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

Kebebasan Individu dalam al-Qur’an

Telah menjadi opini bersama bahwa filosofi individualisme adalah murni produk Barat dan Islam anti terhadap hal tersebut. Masyarakat Islam selalu dilihat sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi konsep kolektivis. Karenanya, tidak mengeherkan bila konsep modernitas seringkali dipertentangkan dengan ajaran Islam.

Pemikiran tersebut memiliki dampak yang cukup serius. Individu-individu muslim meyakini bahwa prinsip kolektivis tersebut adalah perintah yang ada di dalam al-Qur’an. Hal tersebut memicu kurangnya inisiatif individu dalam berbagai ranah sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat Islam. Termasuk dalam kurangnya kebebasan seorang muslim dalam memilih cara hidup (El Harmouzi, 2017, p. 81).

Karenanya, dalam sub-bab ini difokuskan pada hakikat yang diperintahkan di dalam al-Qur’an, apakah cenderung pada kolektivis atau justru individualis? Jika memang pola berpikir tersebut bukan berasal dari al-Qur’an, lantas mengapa dan bagaimana suatu masyarakat muslim memiliki sudut pandang yang kaku dan kurang toleran terhadap keputusan dan peran individu?

Al-Qur’an adalah sumber utama dan paling asasi dalam penetapan hukum di dalam Islam dan menjadi pondasi dalam suatu bangunan peradaban Islam. Tidak sedikit tafsir ayat al-Qur’an yang menyiratkan bahwa penerima wahyu utama Tuhan adalah masing-masing individu manusia. Individu menjadi sasaran utama pewahyuan al-Qur’an kepada manusia. Ia berbicara langsung ke pada sanubari tiap-tiap individu. Dalam al-Qur’an pula Tuhan menempatkan semua tanggung jawab dalam perbuatan individu dan kebebasan untuk memilih perbuatan mereka sendiri (El Harmouzi, 2017, p. 82).

Manusia adalah makhluk yang spesial. Ia merupakan makhluk individu sekaligus sosial. Masing-masing individu hidup dalam satu tatanan sosial, politik, dan ekonomi selama hidupnya. Karenanya, walaupun manusia bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dipilihnya, ia juga dipengaruhi oleh dan di lain waktu mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, meskipun al-Qur’an berbicara kepada tiap individu manusia, kesimpulan sosial, politik, dan ekonomi yang dipilih dan keputusan yang dibuat bersifat komunal menurut Aslam dalam El Harmouzi (El Harmouzi, 2017, p. 83).

Di antara banyak ayat dalam al-Qur'an yang menegaskan tentang pentingnya peran individu dalam masyarakat adalah sebagaimana termaktub dalam Surah al-An'am 94. Ayat tersebut berbunyi 'Hari ini (pada hari perhitungan) kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri (*furada*) sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali pertama'. Dalam ayat tersebut, al-Qur'an dengan jelas menerangkan bahwa pemikul tanggungjawab dari setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan diadili. Konsekuensi dari perbuatan tersebut juga akan ditanggung oleh setiap individu-individu.

Di dalam al-Qur'an juga jelas termaktub bahwa penanggung setiap perbuatan adalah individu itu sendiri dan tidak ada seorangpun yang dapat menggantikannya. Surah al-An'am 164 berbunyi 'Dan tidaklah seorang hamba membuat dosa melainkan kemudharatan itu kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali'. Konteks ini diulang beberapa kali di dalam al-Qur'an seperti dalam Surah Faathir ayat 18, Surah at-Tahrim ayat 11, dan Surah an-Najm ayat 38. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap individu akan menanggung semua perbuatan yang dilakukannya dan mereka tidak akan menanggung kesalahan yang diperbuat oleh individu lainnya.

Rahman (1966) dalam artikelnya berjudul '*The Status of the Individual in Islam*' dalam jurnal *Islamic Studies* memberikan beberapa poin terkait ayat di atas. Ia mengatakan bahwa pengemban keyakinan Ilahiyah terakhir adalah diri sendiri. Istilah yang sering diulang di dalam al-Quran dan juga berbagai ritual keagamaan adalah takwa, yang merupakan tanggungjawab individu dan bukan masyarakat. Dengan takwa, al-Qur'an mencoba menyelaraskan manusia untuk melakukan tanggung jawab moral Islam secara individu.

Tema besar yang sering diulang di dalam al-Qur'an adalah bahwa Tuhan menjadi hakim tertinggi atas semua perbuatan manusia semasa hidupnya di dunia dan setiap orang kelak akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Nya sendirian. Bila melihat dari ayat al-Qur'an yang terakhir diturunkan, yaitu Surah al-Baqarah ayat 281, ayat tersebut semakin menegaskan tema besar tersebut. Ayat tersebut berbunyi 'Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak didholimi (dirugikan)'.¹

Atas dasar pertanggungjawaban individu tersebut Tuhan mengutus para Nabi dan Rasul untuk memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Surah al-Maidah ayat 105 menegaskan "Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu! Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

Keadilan tertinggi ada di tangan Tuhan sendiri. Tuhan memberikan manusia cakupan yang amat terbatas untuk menghakimi dan mengadili satu sama lain dan hanya dalam masalah keduniaan. Dengan demikian, Tuhan memberikan kebebasan manusia untuk memilih jalan hidup mereka. Tuhan berfirman 'Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebaikan dan

kejahatan)' dalam surah al-Balad ayat 10 dan 'Dan katakanlah: Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir' dalam surah al-Kahfi ayat 29. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memegang kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya dan selalu bersiap dengan konsekuensi dengan pilihan yang diambil.

Tuhan berfirman dalam surah al-Jatsiyah ayat 14-15 'Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari Allah karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan'.

Perintah Tuhan di atas sangat jelas. Setiap orang bebas memilih dan bertanggungjawab atas perilaku dalam hidupnya. Akan ada hari perhitungan, tanggung jawab yang Tuhan sendirilah yang menjadi hakim tertingginya. Oleh karena itu, paksaan dilarang dalam hidup ini, dan tak seorangpun berhak memaksa orang lain memilihkan cara hidupnya. Berbagai firman tersebut menjelaskan hubungan langsung yang tegas antara Tuhan dan manusia secara individu.

Tuhan menghendaki setiap orang bebas memilih. Hal tersebut tersirat dalam salah satu firmanNya di surah 36 ayat 66-67: 'Dan jikalau Kami menghendaki (bahwa manusia tidak dapat memahai antara yang benar dan salah), pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan (yang benar), Maka betapakah mereka dapat melihat(nya)? Dan jikalau Kami menghendaki (bahwa mereka tidak bebas memilih antara yang benar dan salah), pastilah Kami ubah mereka (dan menciptakan mereka sebagai makhluk yang mengakar) di tempat ereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali'.

Dalam ayat lain, al-Qur'an memberikan perintah terkait tanggung jawab individu. Al-Qur'an menyatakan 'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (2:286). Di surah al-An'am ayat 164 dan surah Az-Zumar Tuhan berfirman 'seorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu; lalu DIA memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan'.

Berbagai ayat dan firman Tuhan di atas telah menjelaskan bagaimana kebebasan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada tiap individu. Berbagai hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan berbagai paradigma yang menafikan hak dan kebebasan individu dengan dalih semangat kolektivis. Perlu dipahami bahwa masyarakat Muslim, bahkan suatu peradaban Islam tidak dapat terbangun tanpa kontribusi individu-individu Muslim yang baik. Dalam surah al-Muzzammil, Allah membeberkan beberapa perintah yang dibebankan kepada tiap individu untuk menjadi individu yang ideal. Tidak kurang dari 17 kalimat perintah dari Tuhan yang perlu dipenuhi tiap individu.

Setelah mencapai derajat individu yang ideal, barulah dapat berbicara tentang masyarakat yang ideal. Masyarakat ideal sedikitnya dapat tercermin dalam perintah Tuhan dalam surah Ad-Dahr atau al-Insan. Dalam surah tersebut, Tuhan memerintahkan manusia secara kolektif untuk menjadi 'ibaadul-laah (hamba-hamba Allah) yang secara kolektif melaksanakan berbagai perintahNya, seperti memenuhi nazar, takut akan hari di mana azab akan diturunkan secara merata, dan memberi makanan yang disukai kepada para yatim dan tawanan dengan hanya mengharap keridhaan Allah semata.

Dari Ego Iqbal hingga Person Arkoun

Dari berbagai ayat dan penafsirannya di atas tadi, tidak sedikit ilmuwan Islam yang menyuarakan pendapat senada, bahwa individu memiliki posisi penting dalam membangun sebuah masyarakat Islam. Isma'il Raji al-Faruqi menempatkan konsep kebebasan sebagai hakikat dakwah Islam di samping rasionalitas dan universalisme (Al-Faruqi, 2003, p. 220). Menurutnya, dakwah Islam merupakan ajakan untuk memikirkan klaim terpenting tentang hidup dan mati, kebahagiaan dan kesengsaraan, cahaya kebenaran atau gelapnya kepalsuan, kebajikan dan kejahatan. Karenanya, dakwah memerlukan intergritas penuh pendakwah dan objek dakwah.

Objek dakwah harus merasa bebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan paksaan. Bila intergritas tersebut dilanggar dengan adanya penyipuan, meminta keuntungan, paksaan, dan tekanan, maka hal demikian mencederai hakikat dakwah itu sendiri. Tujuan akhir dari dakwah ini adalah objek dakwah harus menerima kebenaran Islam dengan kesadaran penuh dan benar-benar berasal dari hasil penilaiannya sendiri (Al-Faruqi, 2003, p. 220).

Tugas pendakwah sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 286 adalah menyeru manusia kepada keyakinan akan adanya Allah dan berbagai sifatNya. Allah berfirman: 'Tak ada paksaan dalam agama. Kebenaran sudah nyata; Barang siapa menghendaki, biarlah dia beriman; dan barang siapa tidak menghendaki, biarlah dia kafir.. barang siapa menerima dakwah maka yang beruntung adalah dirinya sendiri; barang siapa menolaknya maka yang celaka adalah dirinya sendiri (2: 286; 18: 29; 39:41).

Ketika etika dakwah untuk memberi kebebasan dan menghindari paksaan dilanggar, maka etika manusia akan memandangnya sebagai pelanggaran berat. Pelanggaran berat tersebut bahwa dinilai pelanggaran berat kedua setelah pembunuhan, jika bukan sama. Oleh karenanya, al-Qur'an memerintahkan manusia untuk berdakwah dengan jalan non persuasi. Bila ini tidak berhasil, maka lebih dianjurkan untuk meninggalkannya sebagaimana firmanNya dalam surah Ali Imran ayat 176-177 (Al-Faruqi, 2003, p. 220).

Dari tiga cara dakwah yang diperintahkan Allah dalam surah an-Nahl ayat 125, tidak satupun bermuatan paksaan dan tekanan. Baik hikma, pelajaran yang baik (*al-maw'idzah al-chasanah*), maupun membantah dengan cara yang baik tidak satupun mengekang kebebasan objek dakwah dalam menerima maupun menolak dakwah yang diberikan. Di akhir ayat tersebut, Allah

menegaskan bahwa Ia Maha Tahu tentang siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk.

Hal yang demikian dikarenakan muatan akal dan hati di dalam diri manusia. Pemaksaan dan tekanan akan meniadakan fungsi akal dan hati itu sendiri, yaitu mencapai kebenaran dan kesadaran penuh. Dalam berbagai hal, pemaksaan kehendak kepada manusia lain justru akan membuatnya menjadi beringas ketika 'si pemaksa' tidak berada di sisinya atau ia merasa bebas darinya. Karena hakikat manusia adalah hidup dalam kebebasan.

Tugas muslim adalah bertoleran terhadap pilihan manusia lainnya yang mereka pilih dengan penuh kesadaran. Toleransi sendiri merupakan salah satu prinsip metodologis dalam membangun sebuah peradaban, bukan hanya sekedar masyarakat Islam. Ia merupakan etika sebagai prinsip menerima apa yang dikehendaki sampai ketaklayakannya tersingkap. Yang pertama disebut *sa'ah* dan yang kedua adalah *yusr*. Keduanya melindungi manusia untuk menutup diri dari dunia dan dari konservatisme. Keduanya mendesak muslim untuk mengatakan 'ya' kepada kehidupan dan pengalaman baru (Al-Faruqi, 2003, p. 115).

Sa'ah dan *yusr* juga mendorong muslim untuk menyampaikan data baru, gagasan pikiran dengan analisa yang tajam, dan usaha konstruktifnya. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat memajukan diri mereka dan berimbang pada kemajuan kebudayaan dan peradabannya. Keduanya berasal dari prinsip Tauhid sebagai prinsip metafisika etika. Tuhan telah menciptakan manusia dengan penuh kebebasan untuk dapat membuktikan dirinya berguna dan dapat berbuat hal yang positif. Inilah yang merupakan maksud eksistensi manusia di muka bumi ini (Al-Faruqi, 2003, p. 115). Di antara pesan yang ingin disampaikan Islam kepada seluruh makhluk di Bumi ini adalah persaudaraan, keadilan, bekerja keras, dan kebebasan. Empat hal inilah yang bisa disebut sebagai *Islam's Golden Rule* (Bouhdiba, 1998, p. 464).

Iqbal, salah seorang pemikir muslim besar di abad XX berpendapat serupa. Ia mengatakan bahwa tujuan utama al-Qur'an adalah membangunkan dalam diri manusia suatu kesadaran yang lebih tinggi atas berbagai macam hubungan dengan Tuhan dan semesta. Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa al-Qur'an dengan caranya yang sederhana dan tegas menekankan individualitas dan keunikan manusia itu sendiri. Akibat dari pandangan bahwa manusia sebagai individualitas unik inilah, seorang individu akan merasa bahwa ia tidak mungkin memikul dosa orang lain dan memberikan hak hanya pada usahanya sendiri (El Harmouzi, 2017, p. 84).

Berdasar paparan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip tanggung jawab individu ini merupakan dasar dari keimanan. Oleh karena itu, individu yang baik merupakan ideal spiritual Islam. Darinya, dapat terbentuk suatu komunitas Islam, masyarakat Islam, bahkan peradaban Islam yang kuat.

Iqbal menyebutnya sebagai *Ego* atau *Khudi*. Pribadi yang ideal secara moral dan agama bukanlah negasi diri (*self-negation*) melainkan penerimaan dan penegasan diri sendiri (*self-affirmation*). Hal ini tidak diraih kecuali ia menitikberatkan pada individualitas dirinya dan

mengapresiasi keunikan dirinya. Pendapat ini didasarkan pada pesan Nabi Muhammad SAW *Takhallaqu bi-akhlaqi Allah* 'ciptakan dalam dirimu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah'. Bentuk tertinggi dari kehidupan ini adalah pada tataran individu atau Ego itu sendiri. Egonya yang menuntunnya kepada Tuhan dengan kemandiriannya, bukan karena desakan ataupun pengaruh hal-hal di sekitarnya (Masud, Muhammad Khalid, 2009, p. 248).

Ia menegaskan bahwa *Ego (khudi)* tersebut akan mencapai kebebasan tertingginya dengan menghilangkan berbagai halangan yang merintangai jalan hidupnya. Kebebasan ini hanya bisa diraih bila ia mendekatkan diri kepada individu yang Maha Bebas dan Maha Berkehendak, yaitu Tuhan itu sendiri. Pendek kata, hidup ini adalah satu usaha mencapai kebebasan itu (Iqbal, 1920, p. xxi).

Ego tersebut memiliki perkembangan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah dengan cinta kepada Allah dan rasulNya atau disebut juga dengan 'sublimasi Tauhid'. Tahap kedua adalah penguasaan diri atau *tazkiyatu an-nafs (self-control)*. Tahap ketiga adalah meninggalkan berbagai keinginan dalam mengejar hal yang bersifat duniawi (*al-faqr*) (Iqbal, 1920, p. xxvii). Di dalam tahap pertama dan yang paling utama, sublimasi Tauhid adalah kewajiban pada tiap individual. Menurutnya, hakikat dalam hidup adalah invasi, baik individual yang mempengaruhi masyarakat maupun individu yang terpengaruh oleh masyarakatnya.

Manusia secara individu juga menjadi objek perhatian Hassan Hanafi dalam karyanya 'Kiri Islam'. Menurutnya, berbagai tradisi khazanah Islam klasik kurang memperhatikan manusia sebagai manusia atau individu itu sendiri. Dalam ilmu *Ushul ad-Diin* misalnya, fokus studi tersebut adalah studi tentang manusia, eksistensi manusia, esensi manusia, sejarah manusia, gerakan manusia, dan masyarakat manusia. Namun, tanpa adanya kajian independen tentang manusia justru akan mengeluarkan manusia dari esensinya.

Karenanya, menurut Hassan Hanafi, tugas para peneliti adalah menghilangkan selubung-selubung dan menguak sosok kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan agar para muslim dapat mentransformasikan peradaban mereka dari fase mitos lama ke fase kemanusiaan baru dan mentransformasikan inti kebudayaan dari pengetahuan tentang Tuhan kepada pengetahuan tentang manusia. Untuk merealisasikan semangat tersebut, umat Islam harus membangun kembali manusia sebagai manusia yang khas dan bebas, yang 'ada' oleh eksistensinya, dan menyebar ke seluruh penjuru (Shimogaki, 1997, p. 47).

Semangat tauhid, menurutnya lagi, lebih merupakan prinsip-prinsip rasional murni dari konsep personifikasi Asy'ariyah. Bahwa manusia bebas dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya, ia mempunyai kekuatan menentukan baik sebelum maupun ketika bertindak. Akal manusia dianggap mampu menilai baik dan buruk, karena keduanya adalah sesuatu yang obyektif dan terwujud dalam perbuatan. Dunia ini juga diyakini akan berjalan menuju kebaikan dan membutuhkan reformasi. Pahala manusia akan selalu bergantung pada perbuatan dan disertai iman. Akhir kata, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar merupakan tanggung jawab dari setiap individu muslim (Shimogaki, 1997, pp. 95-96) (Ahmad, 2011, p. 16).

Muhammad Abu-Nimer, pakar dalam resolusi konflik dan dialog untuk perdamaian, memandang bahwa agama Islam merupakan agama yang memiliki hubungan khusus dengan tiap individu pemeluknya. Ia berpendapat bahwa agama Islam adalah suatu sistem atau cara untuk menata makna individu di dalam masyarakat muslim (Abu-Nimer, 2010, p. 9). Mengidentifikasi nilai-nilai keislaman dan gagasan tentang kualitas hidup individu dan pengaruhnya dalam masyarakat adalah kunci untuk memahami bagaimana kebutuhan dasar manusia terpenuhi dalam komunitas-komunitas muslim. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Iqbal bahwa tanda seseorang kafir adalah ia hilang di cakrawala. Sebaliknya, tanda keislaman seseorang adalah cakrawala tenggelam di dalam dirinya (Rahman, 1994, p. 15).

Gagasan keadilan ideal merupakan inti dari konsep bina-damai yang ditawarkan Abu-Nimer. Gagasan tersebut memiliki penekanan luas pada tanggung jawab individu dan kewajiban moral utama mereka dalam melawan berbagai ketidakadilan (Abu-Nimer, 2010, p. 95). Senada dengan Hassan Hanafi, Abu-Nimer juga berkesimpulan bahwa manusia merupakan sumber otonom pengetahuan etis. Artinya, Tuhan menciptakan manusia agar mampu mengetahui yang baik dan buruk secara obyektif. Keadilan Tuhan karena itu bergantung pada pengetahuan obyektif atas kebaikan dan keburukan yang ditentukan oleh akal manusia dalam penuh kebebasan dan tanggung jawab (Abu-Nimer, 2010, p. 123).

Dalam salah satu bab di dalam bukunya, Abu-Nimer memiliki pendapat yang seirama dengan Ismail Raji Al-Faruqi di atas. Pilihan moral dan ajakan moral merupakan prinsip penting dalam Islam yang diajarkan Nabi dan para sahabat dan menekankan tanggung jawab atas perbuatan diri sendiri. Ajakan dan persuasi adalah strategi utama dalam al-Qur'an yang menunjukkan pentingnya kedudukan istimewa akal dan nalar dalam Islam (Abu-Nimer, 2010, p. 134).

Manusia adalah sebagai wakil (khalifah) Tuhan di muka bumi ini. Karena itu, tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kedudukan sebagai agen moral yang diberkahi kehendak bebas dan mampu membuat pilihan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan (Abu-Nimer, 2010, p. 135). Ia dituntut untuk dapat memberikan keputusan dan memilih antara kebaikan dan keburukan sesuai dengan kemampuan akal dan nalar yang telah dikaruniakan Tuhan padanya dan tanpa tekanan maupun intervensi dari siapapun.

Dr. Muhammad Arifin Ismail, dosen Universitas Malaya yang juga peneliti INSISTS, konsep khilafah merupakan pendidikan manusia yang paling lengkap, yaitu menjadi khalifatullah fi'l ardh. Dalam menunaikan tugas mulia tersebut, manusia perlu menjalani sedikitnya 5 tahap, yaitu individu khalifah, keluarga sakinah, *ummat wasathan*, *rahmat li'l 'alamin*, dan *syuhada ala'n naas* (Isma'il, 2019). Hal tersebut disampaikan saat menjadi *keynote speaker* 'National Seminar on Education: Influence of Western Civilization on Millennial's Character' di Universitas Darussalam Gontor pada 20 Januari 2019. Dari hal tersebut tercermin bahwa membangun suatu ummat ataupun peradaban tidak dapat tercapai bila tidak dimulai dari individu-individu yang berkualitas.

Semua konsep tersebut diamini oleh Arkoun. Ia berkesimpulan bahwa seluruh warisan kultural, intelektual, dan spiritual yang diakumulasi dalam tradisi Islam selalu memasok aspirasi bagi pribadi ideal, manusia sempurna atau *al-insan al-kamil*. Tuhan telah membangun berbagai karakteristik dan jalan menuju realisasi ide tersebut. Para wali, sufi, dan ulama menempuh berbagai jalur dalam kehidupan dan pengalaman pribadi mereka dan meninggalkan berbagai catatan untuk generasi penerusnya (Arkoun, 1996, p. 178).

Individu di dalam Islam memiliki posisi yang mulia dan sentral. Ia memiliki kebebasannya tersendiri dalam menentukan berbagai pilihan dalam hidupnya. Berbagai intervensi dan paksaan terhadap kebebasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran, bahkan sebuah penistaan akan kemampuan akal manusia dalam menentukan baik dan buruk, benar dan salah. Kemampuan akal untuk memilih berbagai hal dengan kesadaran penuh akan diikuti oleh tanggung jawab tiap individu terhadap pilihannya di hadapan Tuhannya kelak.

Kebebasan Muslim dalam Memilih Pemimpin

Sebagaimana disebutkan di atas, berbagai prinsip dari al-Qur'an tentang kebebasan individu dalam memilih dan menentukan jalan hidupnya telah jelas. Bila dalam hal dakwah Islam yang merupakan kewajiban fundamental tiap manusia di muka bumi ini diperintahkan untuk menjauhi paksaan dan intervensi, maka demikian pula dalam hal non-fundamental lainnya, termasuk dalam memilih pemimpin negara.

Pemilihan Presiden Republik Indonesia di tahun 2019 menimbulkan banyak fenomena. Kontestasi para calon presiden dan partai pengusung kadangkala berlangsung sehat. Seluruh pasangan calon diberikan kesempatan yang luas dalam mengkampanyekan berbagai program, ide, dan gagasan mereka dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan berbagai indikator ditetapkan oleh setiap pasangan calon dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih. Dengan konsep senada dengan dakwah Islam, diharapkan masyarakat Indonesia yang semakin dewasa dalam berdemokrasi dan cerdas dalam memilih dapat menentukan pemimpin negara yang memiliki kesamaan visi dan misi dan kejelasan program kerja.

Namun, tidak jarang kampanye justru berlangsung 'kurang sehat'. Para pendukung calon presiden tidak hanya berkontribusi dalam sosialisasi visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat umum, melainkan juga berusaha menjatuhkan pihak lain. Dengan menjatuhkan pamor pasangan calon presiden lainnya, diharapkan elektabilitas pasangan calon tersebut juga ikut turun. Berbagai cara 'kotor' dilakukan demi kemenangan pasangan calon yang diusung, mulai dari permainan isu-isu pribadi calon presiden, masalah ekonomi, kejadian masa lalu para calon presiden, kabar bohong, maupun isu agama.

Hal ini dimanfaatkan oleh para oknum yang mengatasnamakan agama untuk mengais keuntungan dalam kontestasi pemilihan umum ini. Seakan memancing di air keruh, mereka

memanfaatkan momentum ini untuk menggunakan label agama dalam strategi politik mereka. Dengan dalih agama, mereka menghalalkan dan mengharamkan perbuatan tertentu. Bagi mereka, landasan agama diharapkan mampu melangkahi norma dan aturan yang telah berlaku (Yahya, 2017, p. 206) (Karman, 2010, p. 23).

Proses politisasi agama ini juga semakin lancar dengan bantuan para pemuka agama di dalamnya. Para elit agama ini diharapkan menjadi pihak yang memiliki wewenang dalam hukum agama dan memilikit otoritas yang mutlak di hadapan para pengikutnya. Epistemologi dan premis-premis normatif suatu agama disusupi oleh syahwat otoritarianisme. Dalam bahasa Khaled Abou El-Fadl, para pemuka dan penafsir agama tersebut tidak lagi berbicara 'tentang Tuhan' namun mereka menjelma menjadi 'juru bicara Tuhan' bahkan 'suara Tuhan itu sendiri' (Muslih, 2009, p. 438).

Masih segar dalam ingatan bangsa ini bagaimana isu panas agama digulirkan dalam pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu. Para pemuka agama tidak sedikit yang ikut menyemarakkan kampanye pasangan calon yang diusung. Alih-alih berbicara tentang program dan prestasi, mereka justru sibuk menjatuhkan lawan politik mereka dengan menggunakan dalil-dalil agama. Walhasil, tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh dengan berbagai isu tersebut.

'Keberhasilan' tersebut kembali diulangi dalam pemilihan presiden kali ini. Dengan dua calon presiden yang sudah bertemu di tahun 2014, kampanye berlangsung dengan tensi tinggi. Isu agama yang nampaknya memiliki efek cukup ampuh kembali digulirkan pada pemilu kali ini. Isu yang digiring juga tidak ringan, yaitu menyangkut pemeluk agama mayoritas di negara ini, Islam.

Meski kedua pasangan calon beragama Islam, namun tidak serta merta memiliki persepsi yang sama di mata umat. Bila di pemilihan kepada daerah kemarin, isu yang beredar adalah pemimpin muslim dan pemimpin non-muslim yang memberikan dampak yang signifikan, maka kali ini kasus berbeda. Karena keduanya beragama Islam dan memiliki pendukung muslim dalam jumlah banyak, isu yang digulirkan adalah pemimpin pro-Islam dan pemimpin 'kurang' pro Islam. Istilah lain yang dimainkan adalah 'pemimpin pilihan ulama' dan 'pemimpin bukan pilihan para ulama'.

Isu tersebut menarik melihat latar belakang kedua pasangan calon. Salah satunya memiliki basis Islam yang mainstream dan yang lain juga memiliki basis partai pendukung yang bernafaskan Islam. Para pendukung juga saling klaim elektabilitas salah satu calon di mata para pemilih muslim. Isu ini seharusnya tidak dapat menggoyahkan kebebasan para pemilih dalam menyuarakan hak pilih mereka. Namun, realitas yang terjadi tidak demikian.

Didukung dengan berbagai *platform* media digital, isu ini semakin deras berhembus. Dalam berbagai pesan singkat yang *dibroadcast*, gaung 'pemimpin pro Islam' dan 'Pemimpin pilihan ulama' semakin menguat setiap harinya. Seolah lupa, para pendukung tidak lagi menyuarakan program kerja dan keunggulan kinerja masing-masing calon. Mereka hanya berfokus pada pelabelan 'Pro Islam' pada calon yang diusung.

Keadaan diperburuk dengan deklarasi 'Ijtima Ulama' yang berafiliasi pada pemberian dukungan kepada salah satu calon. Ijtima ulama ini juga 'diklaim' merupakan aspirasi umat muslim Indonesia. Dengan demikian, pertarungan demokrasi ini menjadi pertarungan 'ulama' dan 'non-ulama'.

Dengan paradigma kolektivisme sebagian masyarakat Islam, pelabelan ini akan berdampak luas. Para individu muslim di Indonesia seakan tidak diberi kebebasan dalam menyuarakan pendapat dan memberikan hak pilihnya dalam pemilu ini. Mereka yang tidak memilih 'pemimpin pilihan ulama' akan terjebak dalam tuduhan 'tidak pro ulama', bahkan 'muslim semi-kafir'. Nalar dan akal sehat muslim dibatasi pada pelabelan tersebut. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa sulit untuk muslim memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka dan dengan kesadaran penuh.

Pandangan bahwa muslim harus tunduk dengan keputusan jama'ah juga membutuhkan akal sehat mereka. Prinsip Islam yang menghargai akal sebagai indikator utama pembeda manusia dengan makhluk lainnya dilanggar dalam fenomena ini. Semangat *Ijtihad* dan *Ittiba'* yang menjadi harapan Islam kepada para pemeluknya terkubur dalam tumpukan *taqlid* buta para pengikutnya. *Taqlid* ini tak lain disebabkan oleh intervensi institusi Islam dalam menentukan pemimpin 'yang seharusnya' dipilih oleh setiap muslim yang taat, hal yang seharusnya menjadi pilihan pribadi penuh pertimbangan dan tanggung jawab.

Tidak berhenti di sini, belakangan juga beredar *broadcast WhatsApp* yang intinya memberikan ancaman untuk berhati-hati dalam memilih calon pemimpin. Pesan tersebut menekankan bahwa para pemilih pasangan calon harus bertanggung jawab dalam apa yang terjadi dalam 5 tahun ke depan. Mereka juga 'diancam' untuk ikut menanggung dosa dari berbagai kebijakan pemerintah dalam 5 tahun ke depan yang 'dirasa' menyengsarakan rakyat. Sebuah totalitas dalam penggiringan wacana dan opini.

Dengan klaim di atas, perbedaan pilihan calon presiden menjadi sebuah alasan untuk 'mengkafirkan' pihak lainnya. Meskipun secara syari'at mereka Islam, namun dikarenakan tidak memilih 'pemimpin pro Islam' mereka 'dianggap sudah menjadi kafir. Nilai toleransi yang menjadi dimensi metodologis dalam bangunan peradaban Islam perlahan luntur dan runtuh. Ia runtuh oleh pengekangan kebebasan menentukan pilihan dan penghakiman atas perbedaan, dalam konteks ini adalah perbedaan pilihan pemimpin negara.

Hal yang demikian merupakan dampak buruk ketika agama dalam bentuk legal-formalnya masuk ke ranah politik. Politisasi para pemuka agama untuk meraih keuntungan pribadi dan golongan juga memperburuk keadaan. Namun, semua hal tersebut sejatinya dapat ditanggulangi andai saja semangat individual muslim tidak tenggelam dalam suara kolektif atau mayoritas. Pendirian yang tidak teguh, *taqlid*, fanatisme buta, dan tren 'ikut-ikutan' ini menjadi sumber kelemahan muslim di Indonesia, bahkan dunia. Berbagai keputusan kolektif dianggap merupakan keputusan sadar dari tiap individu. Karenanya, para individu tidak diberikan ruang untuk berpendapat dan memiliki pilihan tersendiri dalam banyak hal, termasuk dalam pemilu kali ini.

Masyarakat muslim dewasa ini sering melupakan eksistensi individu dalam membangun suatu bangunan masyarakat yang kokoh. Dengan semangat tiap-tiap individu dalam menghargai keunikan tiap pribadi, mereka akan berusaha mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Individu-individu tersebut akan membentuk suatu masyarakat yang berasaskan pada kesadaran masing-masing anggota masyarakat dan menuju pada kepentingan bersama. Logika ini sering dipahami dengan kebalikannya. Keputusan mayoritas dan kolektif dipastikan telah mengakomodir semua kesadaran dan aspirasi tiap individu. Akibatnya, timbul sikap 'cukup yang lain saja selain saya' atau 'kalau yang lain bisa, mengapa harus saya? Bukankah kita berada dalam satu jama'ah?'. Sikap inilah yang bermuara pada kejumudan kreatifitas dan inovasi tiap individu dalam ranah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan agama itu sendiri.

Sikap tersebut juga akan menghilangkan kemampuan bertanggung jawab tiap-tiap individu. Mereka beranggapan bahwa jikalau yang mereka yakini salah, maka para pemimpin dan ulama merekalah yang kelak menerima ganjarannya. Padahal hal demikian telah diingatkan Allah berkali-kali di dalam al-Qur'an. Allah berfirman: '(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali' (Surah al-Baqarah: 166). Hal tersebut diulang lagi dalam Surah an-Nahl ayat 86, Ibrahim ayat 21, dan az-Zukhruf ayat 22.

Meminjam berbagai definisi individualisme di atas, sudah saatnya tiap individu muslim mengembangkan diri lebih baik. *Disengaged Self* perlu ditanamkan dalam diri setiap muslim tanpa paksaan dan penggiringan opini. Pemaksaan kehendak pada pihak lain merupakan sebuah pelanggaran terhadap kewarasan nilai kemanusiaannya. Di samping itu, prinsip *strong evaluator* juga menjadi sentral dalam hidup seorang muslim. Dengan demikian, ia dapat memutuskan berbagai hal dengan penuh kesadaran, berpegang pada prinsip kebenaran yang dianut, dan di akhir, siap bertanggung jawab atas pilihan tersebut di kemudian hari.

Simpulan

Individualisme bukanlah suatu paham yang berfokus pada diri sendiri dan menafikan peran manusia lainnya. Paham ini justru menghargai individu sebagai pribadi yang unik dan berbeda dengan individu lainnya. Setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keunikan tersebut dengan penuh kebebasan.

Islam, melalui al-Qur'an berbicara kepada tiap-tiap individu. Hubungan yang terjalin adalah antara Tuhan dan tiap-tiap individu. Berbagai individu bebas menentukan pilihannya dalam berbagai hal. Setiap pilihan yang diambil hendaknya merupakan kesadaran pribadi dan penuh dengan tanggung jawab. Hal yang demikian dikarenakan kelak di pengadilan tertinggi Tuhan, tiap individu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan pilihan yang diambilnya.

Toleransi terhadap perbedaan pilihan merupakan salah satu asas metodologi dalam peradaban Islam. Bahkan, dakwah Islam pun menghindari berbagai paksaan dan tekanan. Ia

mensyaratkan sebuah kesadaran penuh tanggung jawab dalam melakukan pilihan. Karenanya, individualisme merupakan sebuah kombinasi antara *disengaged self* dan juga *strong evaluator*.

Kontestasi pemilihan presiden Indonesia memiliki banyak dampak terhadap kondisi masyarakat saat ini. Politisasi simbol-simbol keagamaan menjadi salah satu hal yang meramaikannya. Masyarakat Muslim di Indonesia saat ini dikepung dengan tagline 'Presiden Pilihan Ulama' atau 'Presiden Pro Islam', sebuah pernyataan yang menyudutkan para muslim yang memiliki perbedaan pilihan dan pendapat. Hal tersebut didorong dengan semangat kolektivisme yang dianggap sebagai tujuan Islam dan bukannya menggunakan nalar dan akal sehat tiap individu. Walhasil, tidak sedikit muslim Indonesia yang kehilangan kebebasan berpendapat dan lebih memilih ikut-ikutan atau taqlid buta agar tidak dipandang buruk oleh mayoritas jama'ahnya.

Bila hal tersebut berlanjut, semangat untuk membangun masyarakat muslim yang baik hanya berhenti pada impian. Jangankan untuk membangun peradaban Islam yang sempat tertidur lama, membangun suatu komunitas muslim yang kuat saja amat sulit. Semangat individualisme dibutuhkan dalam membangun suatu peradaban karena masyarakat yang kuat berisi tiap-tiap pribadi yang kuat. Yaitu pribadi yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri, mampu memilih apa yang ia mau dengan penuh kebebasan, kesadaran, dan tanggung jawab penuh.

Daftar Pustaka

- Abu-Nimer, M. (2010). *Nirkekerasan dan Bina-Damai Dalam Islam: Teori dan Praktik* (T. M. I. R. dan K. Azhar, ed.). Jakarta: Democracy Project.
- Ahmad, N. (2011). The Concept of Collectivism in Relation to Islamic and Contemporary Jurisprudence. *The Open Law Journal*, 4.
- Al-Faruqi, I. R. dan L. L. al-F. (2003). *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang* (I. H. J. Terj, ed.). Bandung: Mizan.
- Arkoun, M. (1996). *Rethinking Islam* (T. Y. W. A. dan L. Khuluq, ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bouhdiba, A. (1998). *The Different Aspects of Islamic Culture: The Individual and Society in Islam*. France: UNESCO Publishing.
- Crittenden, J. (1992). *Beyond Individualism: Reconstituting the Liberal Self*. New York: Oxford University Press.
- El Harmouzi, N. (2017). *Islam dan Kebebasan: Argumen Islam untuk Masyarakat Bebas* (L. Whetstone, ed.). Jakarta: Suara Kebebasan.
- Iqbal, M. (1920). *The Secrets of The Self (Asrar-I Khudi)* (terj. R. A. Nicholson, ed.). London: Macmillan and Co.Ltd.
- Isma'il, M. A. (2019). *Influence of Western Civilization on Millennial's Character*. gontor.
- Karman, Y. (2010). *Runtuhnya Kepedulian Kita: Fenomena Bangsa Yang Terjebak Formalisme Agama*. Jakarta: Kompas.
- Masud, Muhammad Khalid, et. a. (2009). *Islam and Modernity: Key Issues and Debates*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Muslih, M. (2009). Membongkar Logika Penafsir Agama, Book Review Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women. *Tsaqafah*, 5(2).
- Rahman, F. (1994). *Major Themes of The Qur'an*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica.
- Shimogaki, K. (1997). *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme, Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi* (Terj. M. I). Yogyakarta: LKiS.
- Yahya, Y. K. (2017). Fenomena Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia. *Kalimah Universitas Darussalam Gontor*, 15(2).